

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan badan publik di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menyediakan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka memenuhi kewajiban ini, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) telah meluncurkan situs web PPID sebagai sarana keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kesesuaian implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh PT KAI dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keterbukaan informasi publik dalam situs web PPID.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di PT KAI. Teori ini mencakup empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Setiap aspek dilengkapi dengan sub-aspek seperti sosialisasi, ketersediaan sarana-prasarana, anggaran, dan pelaksana, komitmen, budaya perusahaan, dan struktur organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data. Metode ini membantu peneliti untuk menemukan alasan di balik keberhasilan dan kendala dalam implementasi KIP.

Hasil penelitian menunjukkan, PT KAI telah memenuhi sebagian besar ketentuan Undang-Undang KIP dengan membentuk unit PPID, menyusun SOP yang komprehensif, dan secara umum memenuhi kewajiban untuk menyediakan informasi publik. Kendati demikian, tantangan seperti dinamika organisasi dan kekurangan informasi tertentu masih menjadi perhatian. Studi ini menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi di lingkungan badan publik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, PT KAI, Implementasi Kebijakan, Badan Publik

SUMMARY

Indonesian Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP) mandates public institutions in Indonesia, including State-Owned Enterprises (SOEs), to provide transparent and accountable public information. To fulfill this obligation, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) launched the PPID (Public Information and Documentation Officer) website, as a means of ensuring information transparency. This study aims to examine the alignment of PT KAI's implementation of Public Information Disclosure with Indonesian Law Number 14 of 2008 and to identify factors influencing the implementation of public information disclosure on the PPID website.

The study employs Edward III's policy implementation theory to analyze the factors influencing policy implementation at PT KAI. This theory comprises four main factors: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Each aspect is complemented by sub-aspects, such as socialization, the availability of facilities, budgeting, implementer commitment, organizational culture, and organizational structure.

This research employs a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. Data analysis utilized the Miles and Huberman model, which involves data collection, reduction, display, and conclusion drawing. This method enables the researcher to uncover the reasons behind the successes and challenges in the implementation of KIP.

The research shows that PT KAI has done a good job of following the Public Information Disclosure Law. They've set up a special information unit, created clear rules, and generally share information well. But there are still some problems, like when people change jobs and some information is missing. This study is important because it shows we need to keep working to make government agencies more transparent.

Kata Kunci: Public Information Disclosure, PT KAI, Policy Implementation, Public Institution